



**PENGARUH ALOKASI DANA KELURAHAN DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN
PEMBANGUNAN KELURAHAN DI KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar
Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus Semarang

Disusun oleh :

SITI ARININGSIH
NPM: 211003631010516

PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI : ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN



**PENGARUH ALOKASI DANA KELURAHAN DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN
PEMBANGUNAN KELURAHAN DI KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL**

SITI ARININGSIH
NPM : 211003631010516


TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Program
Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua
Program Studi pada tanggal seperti tertera dibawah ini

Semarang, Maret 2023

Menyetujui,

Pembimbing I


Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si
NIDN. 060307550J

Pembimbing II


Dr. Karmanis, M.Si
NIDN. 0605066601

Menyetujui,
Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik


Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si
NIDN. 0618056501

LEMBAR PENGESAHAN



PENGARUH ALOKASI DANA KELURAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KELURAHAN DI KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

SITI ARININGSIH
NPM: 211003631010516

PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Tim Penguji dan disahkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Semarang, Maret 2023

1. Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si
Ketua Tim Penguji/Pembimbing
2. Dr. Karmanis, M.Si
Penguji 2
3. Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si
Penguji 3

.....
.....
.....

Mengesahkan,
Dekan FISIP, UNTAG Semarang

Dr. Rini Werdiningsih, M.S.
NIDN. 0621105901



ABSTRAK

Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan untuk menjaga harmoni karena pada wilayah kabupaten terdapat desa dan kelurahan maka pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Kelurahan harus memenuhi beberapa komponen evaluasi tetapi kelurahan di Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal menghadapi permasalahan, dimana anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah semakin menurun, sehingga hanya sebagian program dan kegiatan saja yang bisa dilaksanakan. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan jenis penelitian eksplanatori diperoleh kesimpulan bahwa adanya hubungan yang signifikan antar kedua variabel dan hipotesis penelitian yang menyatakan "*Ada hubungan alokasi dana kelurahan dan partisipasi masyarakat terhadap perkembangan pembangunan kelurahan di Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal*" memperoleh hasil yang signifikan.

Kata Kunci : Alokasi dana kelurahan, partisipasi masyarakat, perkembangan pembangunan kelurahan